

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran secara umum merupakan sebuah agenda yang diatur secara terstruktur yang nantinya akan dicapai pada periode saat tertentu dinyatakan pada satuan finansial. Anggaran mencakup seluruh kegiatan dalam berorganisasi maupun perusahaan demi terlaksananya agenda tersebut dan untuk mencapai tujuannya. Proses anggaran adalah tahapan yang harus terlaksana dengan baik sehingga didiskusikan dan didedikasikan secara menyeluruh kepada semua yang terkait didalamnya, kemajuan organisasi, dan perkembangan yang terarah.

Ramandei (2009) mengataka bahwa suatu Organisasi membutuhkan anggaran guna memmanifestasikan semua taktik ke dalam planning serta tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Sinurat, 2015). Sartono (2014) mengungkapkan bahwa anggaran memiliki fungsi krusial bagi sektor publik khususnya pemerintahan sebab, 1) instrumen bagi pemerintah buat memilih arah pembangunan sosial ekonomi, mengklaim kesinambungan, serta mempertinggi kualitas hidup warga , 2) sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan warga artinya tidak terbatas serta terus berkembang, 3) bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat (Meilia, 2015). Panghegar(2013) mengungkapkan bahwa anggaran ialah Alat perbandingan kinerja antara tujuan anggaran yang ditetapkan dan pencapaian aktual hasil organisasi.

Sistem Anggaran Pemerintah Umum memiliki aturan yang jelas sesuai dengan

aturan Menteri Keuangan dan disesuaikan setiap tahun untuk mempersiapkan anggaran untuk tahun berikutnya. Anggaran pemerintah pusat dikenal dengan RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga). Hal ini tentunya juga berlaku bagi kejaksaan, salah satu lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pidana di lingkungan hukum.

Proses penganggaran kejaksaan diawali dengan penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merinci kebutuhan anggaran masing-masing bidang kejaksaan berdasarkan realisasi pengerjaan anggaran teknis. Sementara anggaran operasional disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan pegawai yang terlibat.

Dalam hal ini, penyusunan anggaran yang dimaksud ialah penyusunan anggaran rutin dan penyusunan anggaran pembangunan di bagian perencanaan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. **Bagaimana** proses penyusunan anggaran rutin serta anggaran pembangunan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, yang sebagai tujuan serta latar belakang pada penulisan tugas akhir ini.

Maka berkaitan dengan hal yang telah dibahas diatas maka penulis tertarik untuk membahas sebuah judul, **“PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN RUTIN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul serta latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dapat di lihat konflik sebagai berikut:

1. Bagaimana anggaran rutin dan anggaran pembangunan disusun pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk memahami proses penyusunan anggaran rutin serta anggaran pembangunan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan pengetahuan tentang kondisi dunia kerja serta permasalahan yang sering ditemui dan pemecahannya.
2. Menerapkan ilmu yang sudah penulis dapat selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis perihal proses penyusunan anggaran rutin serta anggaran pembangunan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
4. Membangun Kepribadian yang bertanggung jawab serta andal dalam dunia kerja.

1.4.2 Bagi Universitas Andalas

1. Untuk menjalin kerja sama dan hubungan yang baik antara Universitas Andalas dan Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang.
2. Untuk menaikkan kualitas lulusan universitas melalui pengalaman kerja magang, agar Universitas Andalas semakin dikenal oleh masyarakat luas serta dunia kerja.
3. Mengenalkan Diploma III Akuntansi yang berkualitas dan siap bersaing di khalayak umum dimanapun berada.

1.4.3 Bagi Instansi

1. Dapat membangun kerja sama antara instansi terkait dan lembaga pendidikan.

2. Berkontribusi langsung pada pekerjaan karyawan suatu institusi atau perusahaan.
3. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.
4. Membantu dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5 Sistematika Laporan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, lokasi, rencana kegiatan, serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memperkenalkan beberapa teori dasar yang digunakan, mencakup pengertian anggaran, partisipasi anggaran, dan tujuan anggaran..

BAB III : GAMBARAN UMUM

Pada hal ini penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Uraian dimulai dari awal berdirinya, visi misi, struktur instansi, tujuan serta lokasi, serta manfaat instansi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas terkait “Proses Penyusunan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat”.

BAB V : PENUTUP

Membahas terkait kesimpulan serta saran.